

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep

Nurul Istiqamah¹, Muh. Arif^{2*}, Mappaujung Maknun³, Mapparenta⁴, Awaluddin⁵
istiqamahnr12@gmail.com¹, muh.arif@umi.ac.id^{2*}, mappaujung.maknun@umi.ac.id³,
mapparenta.mapparenta@umi.ac.id⁴, awaluddin.awaluddin@umi.ac.id⁵

¹Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia
^{2*,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Adanya fenomena-fenomena yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini. Khususnya mengenai kondisi ekonomi terkait Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi. Peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan alasan yaitu, kedua komponen ini merupakan penerimaan daerah yang merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah yang diharapkan mampu mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Maksud dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh dua komponen tersebut terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah agar dapat lebih di tingkatkan.. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS for windows versi 20. Berdasarkan Hasil regresi berganda pada penelitian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pembangunan daerah sebagai aspek dari bagian pembangunan nasional tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh dua landasan hukum yaitu Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Otonomi daerah adalah hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Hal ini harus dimengerti sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu pengambilan keputusan yang tepat pada asas pertanggungjawaban publik. Salah satu indikator penting untuk mengamati keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dengan melihat pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Ada berbagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, tingkat pendapatan perkapita (PDRB), dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya ditunjukkan dengan melihat produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi,

setiap daerah membutuhkan dana yang tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saja tetapi bersumber pula dari pendapatan daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk – bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam penciptaan kemandirian suatu daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan public dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana kemampuan pembiayaan daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah, serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggara kegiatan pemerintah daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan. Untuk memahami lebih komprehensif tentang eksistensi dan pengertian Pendapatan Asli Daerah dalam APBD dapat dijabarkan dalam komponen Pendapatan Daerah yaitu terdiri dari pertama Pendapatan Asli Daerah yang dimana termasuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, kemudian yang kedua adalah Dana Perimbangan yang dimana termasuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, adapun komponen yang ketiga adalah Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dimana termasuk Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Darurat. Pemerintah daerah juga terlihat bergantung pada dana transfer terutama Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerahnya. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep, penerimaan Kabupaten Pangkep yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dari periode tahun 2011 - 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan pada Dana Alokasi Umum sendiri mengalami fluktuasi. Pertumbuhan Ekonomi juga terus meningkat setiap tahun.

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah dari periode tahun 2011 - 2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Dana Alokasi Umum (X2)	Pertumbuhan Ekonomi (Y)
2011	60,930,305,487.71	385,552,312,000.00	9503.81
2012	73,049,407,169.07	489,962,003,000.00	10288.64
2013	101,835,962,272.81	566,929,217,000.00	11248.48
2014	129,209,748,612.26	623,418,990,000.00	12419.76
2015	144,007,118,293.22	650,132,194,000.00	13367.01
2016	156,226,631,623.17	701,629,223,000.00	14477.29
2017	162,773,899,914.54	689,947,090,000.00	15433.5
2018	174,288,744,559.94	752,773,975,000.00	16168.91
2019	185,010,202,184.64	784,495,577,000.00	17205.17
2020	196,530,900,657.27	713,388,948,000.00	16915.23

Sumber Tabel 1 : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep. Dalam penelitian ini dikembangkan hipotesis sebagai berikut : (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkep. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkep.

Metode Analisis

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pangkep. Data penelitian diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep. Populasi penelitian ini yaitu di Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan sampel data dalam periode 2011 – 2020.

Adapun karakteristik sampel diambil dari laporan ataupun data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangkep. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data sekunder yaitu data dari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur-literatur, laporan-laporan maupun arsip resmi. Sumber data berasal dari publikasi Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif dengan metode kuantitatif. Untuk menjawab hipotesis penelitian, data akan dianalisis melalui beberapa tahap pengujian, yaitu uji linearitas reresi, uji berdistribusi normal, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode regresi linear berganda melalui uji r², uji F, uji t.

Dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis regresi linear berganda yaitu cara untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar pengaruh variabel – variabel bebas terhadap variabel terikat.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- X1 = Pendapatan Asli Daerah
- X2 = Dana Alokasi umum
- a = Konstanta Regresi
- e = Faktor eror

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk uji linearitas regresi adalah 0,950 untuk variabel Pendapatan Asli Daerah dan 0,359 untuk Dana Alokasi Umum. Dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dipastikan terdapat hubungan linear secara signifikan antar variabel. Sehingga data-data tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut. Uji Distribusi Normal adalah uji untuk mengukur apakah data memiliki distribusi normal sehingga penelitian ini dapat diteruskan. Dalam penelitian ini nilai absolute (D) lebih besar dari 0,05 maka dapat dipastikan data tersebut berdistribusi normal dan layak diteliti lebih lanjut.

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	8417,251	2054,999		4,096	,005		
1 Pendapatan asli daerah (X1)	4,867E-009	,000	,104	3,79	,016	,877	1,140
Dana alokasi umum (X2)	8,129E-009	,000	,694	2,544	,038	,877	1,140

Sumber Tabel 2: Peneliti (2022)

Dengan bantuan SPSS 20 for windows yang ada di atas maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 8417,251 + 4,867X_1 + 8,129X_2 + e$$

Nilai konstanta sebesar 8417,251 hal tersebut berarti jika tidak ada perubahan dari variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, maka diperoleh nilai konstanta sebesar 8417,251 pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkep (Y). Koefisien regresi linier berganda untuk Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 4,867. Pada penelitian ini dapat dinyatakan bahwa adanya pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkep. Semakin tingginya jumlah Pendapatan Asli Daerah, maka akan memberikan dampak pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkep. Koefisien regresi linier berganda untuk Dana Alokasi Umum adalah sebesar 8,129. Pada penelitian ini dapat disimpulkan jika ada pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkep. Semakin besar jumlah Dana Alokasi Umum, maka akan berdampak pula pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan tabel 2, besarnya nilai R-Square adalah sebesar 0,543. Artinya variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dapat menjelaskan variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi sebesar 54,3 %. Sedangkan sisanya 45,7 % dijelaskan oleh faktor – faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,737 ^a	,543	,412	2128,085	1,361

a. Predictors: (Constant), dana alokasi umum (X2), pendapatan asli daerah (X1)
 b. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi(Y)

Sumber Tabel 3: Peneliti (2022)

Untuk mengetahui hasil uji simultan yaitu dengan melihat tingkat signifikansi 0,05. Maka, $df_1 = (\text{Jumlah variabel} - 1) = (3 - 1) = 2$. Kemudian df_2 dengan rumus $(n - k - 1) = (10 - 2 - 1) = 7$. Maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 4,74. Dari hasil pengujian simultan dengan bantuan SPSS 20, dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu $4,855 > 4,74$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,045 < 0,05$ maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 4 Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37632561,606	2	18816280,803	4,855	,045 ^b
	Residual	31701235,048	7	4528747,864		
	Total	69333796,654	9			

Sumber Tabel 4: Peneliti (2022)

Pada tabel 4, Nilai t tabel dengan $df = (n - k - 1)$ atau $(10 - 2 - 1) = 7$ maka ttabel diperoleh sebesar 1,894. Dari hasil pengujian parsial (Uji t) dengan bantuan SPSS 20 di atas dapat disimpulkan bahwa :

a. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai thitung > ttabel dimana $3,79 > 1,894$ dengan tingkat signifikansi $0,016 < 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan jika Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep.

b. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai thitung $>$ ttabel $2,544 > 1,894$ dengan tingkat signifikansi $0,038 < 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep.

Pembahasan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah diuraikan di atas, berikut pembahasan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah Kabupaten/kota, adapun rumus untuk menghitung besaran PAD yaitu sebagai berikut : $PAD = \text{Pendapatan Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}$. Jika dilihat dari data-data yang peneliti teliti di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep bervariasi dan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Tinggi rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah atau dengan kata lain semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

Hasil pengujian hipotesis secara parsial pada uji (t) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial pada Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep, ditunjukkan dengan nilai thitung $>$ nilai ttabel yaitu $3,79 > 1,894$ dan nilai signifikan yang lebih kecil dari $0,05$ yaitu $0,016 < 0,05$. Begitupun untuk hasil tabel uji regresi linier berganda yang memiliki hasil signifikan dan pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang artinya hipotesis tersebut diterima, yang ditunjukkan dengan koefisien $4,867$. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sendirinya dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan daerah terbesar yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, serta dari pendapatan – pendapatan lain yang sah. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang baik serta diikuti dengan peningkatan setiap tahunnya akan mampu mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Sehingga dapat dinyatakan, semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakin besar pula pengaruhnya dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan jika Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wulan Fauzini (2013) dan Muhammad Ridwan Manulusi (2021) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB).

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum salah satu dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerah untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Besarnya DAU yang diterima pemerintah daerah juga sangat bergantung pada besaran tingkat kebutuhan suatu daerah yang tercermin dalam RAPBD masing-masing daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan UU No. 32 Tahun 2004 pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dalam pengujian hipotesis parsial (Uji t) menunjukkan nilai thitung $>$ ttabel yaitu $2,544 > 1,894$ dan nilai signifikan yang lebih kecil dari $0,05$ yaitu $0,038 < 0,05$. Dengan ini dapat dinyatakan jika Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep dengan koefisien 8,129. Meskipun Dana Alokasi Umum di Kabupaten Pangkep cenderung mengalami fluktuasi namun dana transfer dari pemerintah pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau dalam pelayanan lainnya. Dana Alokasi Umum dapat dikategorikan sebagai transfer tak beryarat atau block grant yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari bantuan ini untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Pangkep (PDRB). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian.et. al (2018) dan Muhammad Ridwan Manulusi yang menunjukkan jika Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Tetapi bertolak belakang dengan Zuwesty Eka (2015) yang menunjukkan hasil jika Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep, Pada uji statistik simultan (Uji F) yang menguji pengaruh seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, pada penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan atau bersama-sama, dua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian statistik uji F menunjukkan dengan nilai signifikansi 0,045 jauh lebih kecil dari 0,05 dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu 4,855 yang lebih besar dari 4,74. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan/bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep. Artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin mendorong tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang lebih tinggi.
2. Variabel Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh secara positif dan signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep. Artinya dengan adanya Dana Alokasi Umum yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat juga dapat mendorong tingkat Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut.
3. Hasil Pengujian secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dapat menjelaskan variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi sebesar 54,3 %. Sedangkan sisanya 45,7 % ditentukan oleh faktor – faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, adapun beberapa saran untuk Kabupaten Pangkep dan peneliti itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat tercipta daerah yang lebih maju dan tidak terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat.

2. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dengan efisien Dana Alokasi Umum (DAU) agar Pertumbuhan Ekonomi setiap periodenya dapat bertambah demi kesejahteraan daerah tersebut.
3. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih memperluas ruang lingkup penelitiannya, karena bisa saja hasil penelitiannya akan berbeda apabila dilakukan di daerah lain.
4. Hendaknya peneliti dapat memperluas variabel lain sebagai moderasi misalnya dana perimbangan yang lain selain Dana Alokasi Umum, sehingga hasil penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperoleh kontribusi yang lebih berarti.

Referensi

- Ahmad Yani, 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Raja Grafindo :Jakarta
- Bastian, Indra, 2006. (2004) Sistem Akuntansi Publik. Salemba Empat : Jakarta
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim Abdul dan Theresia Damayanti, 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN : Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset : Yogyakarta
- Michael P. Todaro, Stephen C Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi. Erlangga : Jakarta
- Rahardjo Adisasmita, 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Soeparmoko. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah. Yogyakarta :Andi Offset.
- Soeparmoko. 2012. Keuangan Negara (dalam teori dan praktik). BPF. Yogyakarta.
- Sukirno, S. (2014).Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijakan. Jakarta: Penerbit FE-UI dan Bina Grafika.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.
- Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- <https://text-id.123dok.com/document/9ynmlnkpz-pendapatan-asli-daerah-dana-alokasi-umum.html>
- <http://bpkad.makassar.go.id/bpkadmakassar/profile/tujuan-sasaran/>
- <https://www.spssindonesia.com/2017/03>
- <https://pangkepkab.go.id>